



Perspektif Akuntansi
Volume 5 Nomor 1 (Februari 2022), hal. 077-092
ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online)
Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Center for Accounting Development and Research (CARD)
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: <https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p077-092>
<http://ejournal.uksw.edu/persi>

De Galesong : Sustainability Accounting dan Dilema Masyarakat Pesisir

Sultan Syah¹
Universitas Trunojoyo Madura

Latifah Sukmawati Yuniar
Universitas Tadulako

Ibrahim
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang

Sri Rahayu Syah
Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar

Received
05/02/2022

Revised
22/03/2022

Accepted
13/04/2022

Abstract. *Purpose—Deconstruct economic, social, and environmental realities in coastal communities with a political economy accounting perspective. Design/methodology/approach — A qualitative method with the postmodern paradigm and political economy accounting perspective. Findings — The results of this study found that the political economy of accounting plays an important role in "transacting" like a coin (metal) which has two different sides. Where on the one hand the actors (fishermen) have economic interests that clash with the preservation of nature and on the other hand, economic and social life still depend on nature as their main source. Thus, the deconstruction results offered can harmonise the relationship between society (economy and social) with nature. Practical Implications — Regional and central governments, especially the ministry of marine and fisheries, as well as coastal communities can benefit from sustainability accounting so that economic activities can run in harmony with social life and environmental sustainability. Originality/value — the deconstruction results offered come from the genius local wisdom of coastal communities that are starting to be forgotten. This paper tries to deconstruct the reality of coastal communities in providing solutions without destroying the main*

¹sultanakuntan@gmail.com

livelihoods of the community. The parameters applying the triple bottom line concept are that there is harmonisation between the economic, social, and environmental aspects.

Keywords: *Sustainability, Accounting, Coastal, Abrasion*

Abstrak. Tujuan - mendekonstruksi realitas ekonomi, sosial, dan lingkungan di masyarakat pesisir dengan perspektif akuntansi ekonomi politik. Desain/metodologi/pendekatan - Metode kualitatif dengan paradigma *postmodern* dan perspektif akuntansi ekonomi politik. Hasil - penelitian ini menemukan bahwa ekonomi politik akuntansi memainkan peran penting dalam "bertransaksi" seperti koin (logam) yang memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi para pelaku (nelayan) memiliki kepentingan ekonomi yang berbenturan dengan pelestarian alam dan di sisi lain, kehidupan ekonomi dan sosial masih bergantung pada alam sebagai sumber utama mereka. Dengan demikian, hasil dekonstruksi yang ditawarkan dapat menyelaraskan hubungan antara masyarakat (ekonomi dan sosial) dengan alam. Implikasi Praktis - Pemerintah daerah dan pusat, khususnya kementerian kelautan dan perikanan, serta masyarakat pesisir dapat memperoleh manfaat dari akuntansi keberlanjutan sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan selaras dengan kehidupan sosial dan kelestarian lingkungan. Orisinalitas/nilai - hasil dekonstruksi yang ditawarkan berasal dari kearifan lokal jenius masyarakat pesisir yang mulai dilupakan. Artikel ini mencoba mendekonstruksi realitas masyarakat pesisir dalam memberikan solusi tanpa menghancurkan mata pencaharian utama masyarakat. Parameter yang menerapkan konsep *triple bottom line* adalah bahwa ada harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kata kunci: Keberlanjutan, Akuntansi, Pesisir, Abrasi

Pendahuluan

Permasalahan keberlanjutan telah menarik perhatian negara-negara di dunia untuk membahasnya pada berbagai Konferensi Tingkat Tinggi Bumi. Bahkan dalam tulisannya, Gray (1992) mengemukakan salah satu tantangan langsung bagi model ekonomi dunia yang berjalan melalui akuntansi dan keuangan konvensional adalah keberlanjutan. Hal tersebut dipicu oleh antroposentris yang mendorong manusia untuk mencapai tujuan menguasai dan mengendalikan alam. Akibatnya, terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan (Harari, 2016) dengan kepentingan lingkungan (Hartatil, 2007). *Locus of control* permasalahan keberlanjutan (lingkungan) terletak pada pendistribusian laba yang dilakukan oleh pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Pendistribusian laba yang diperoleh masih berfokus pada kepentingan *stakeholder*

yang mengutamakan aspek² ekonomi. Kamayanti (2016) menjelaskan bahwa pendistribusian laba sendiri telah lama menjadi bahan diskusi bagi Tinker (1980) sebagai pengagas *Political Economy Accounting* (PEA).

Pelaporan laba dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi merefleksikan bahwa angka – angka yang tercetak merupakan implementasi dari kejayaan perusahaan. Dalam perspektif *Political Economy Accounting* tidak mempersoalkan mengenai laba tetapi kebijakan yang diadopsi untuk penggunaan kebijakan akuntansi termasuk biaya lingkungan (*environmental costs*). Biaya lingkungan berpengaruh negatif terhadap besarnya laba bersih (Sari, 2020). Hal tersebut membuat manajemen dan *stakeholder* memberikan perhatian terhadap biaya lingkungan karena memiliki hubungan erat dengan laba. Biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk *Corporate Social Responsibility* (Bell dan Lehman, 1999; Ministry of the Environment Japan, 2005:Hal. 3; de Beer dan Friend, 2006; AICPA, 2004 dalam Volosin, 2008: Hal. 3; Cohen dan Robbins, 2011; Ministry of the Environment Japan, 2005) merupakan unit analisis dalam *sustainability accounting*.

Sustainability accounting lahir dari berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia (Sukoharsono, 2017) dan mewajibkan perusahaan untuk mengeluarkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia (Michella et al., 2017). Salah satu topik menarik untuk diteliti pada kajian *sustainability accounting* mengenai masyarakat lokal khususnya yang berada di pesisir. Masyarakat pesisir mengalami kasus abrasi pantai sudah menjadi masalah kontemporer di seluruh dunia termasuk Indonesia yang telah terjadi di berbagai pulau (Damaywanti, 2013; Hernowo, 2012; Prawiradisastra, 2003; Setyandito dan Triyanto, 2007; Tarigan, 2007). Salah satu pulau yang mengalami abrasi pantai yaitu Pulau Sulawesi tepatnya di sepanjang pantai Galesong.³ Masyarakat pesisir yang berdiam di sepanjang pesisir pantai tersebut telah merasakan dampak dari abrasi tersebut. Walaupun abrasi pantai telah berlangsung lama, belum dilakukan tindakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat pesisir termasuk nelayan.

Dilema nelayan semakin memuncak ketika perekonomian keluarga terusik dan tempat tinggal terancam oleh abrasi. Pembangunan tanggul tidak memberikan solusi yang berguna bagi perekonomian nelayan. Kapal – kapal nelayan yang terbuat dari

² Memahami ekonomi politik produksi rekan membutuhkan pertimbangan setidaknya dua faktor yang saling terkait yaitu faktor ekonomi yang memungkinkan munculnya produksi rekan dan faktor budaya yang unik dalam komunitas produksi rekan yang memiliki potensi untuk menumbangkan kecenderungan global yang berlaku (Birkinbine, 2020)

³ <https://makassar.kompas.com/read/2020/01/07/15065931/abrasi-pantai-galesong-sulsel-puluhan-rumah-dan-kuburan-hilang?page=all>, <https://mediaindonesia.com/read/detail/288746-abrasi-pantai-galesong-membuat-rumah-penduduk-terancam>, <https://news.okezone.com/read/2020/01/08/609/2150794/pantai-galesong-takalar-alami-abrasi-belasan-rumah-warga-terancam-hilang>,

kayu tidak bisa disandarkan ke daratan. Para *stakeholder* termasuk perusahaan pengelolaan hasil tangkapan laut (baik skala kecil dan besar) yang berada di daerah tersebut tidak banyak memperhatikan permasalahan abrasi pantai. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh peneliti adalah masuk ke dalam komunitas lokal dan instansi yang memiliki kebudayaan sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Amalia (2014) bahwa budaya merupakan fungsi pengikat seseorang pada suatu masyarakat dan sekaligus sebagai pembeda antara masyarakat lainnya, serta memiliki beberapa unsur-unsur yang mendukung pembentukannya. Penelitian mengenai politik ekonomi telah banyak dilakukan oleh peneliti pada berbagai bidang.⁴ Hal tidak mengherankan ketika Tinker (1985) menjelaskan bahwa praktik akuntansi merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik sosial, alat untuk menilai persyaratan pertukaran antara konstituen sosial, mekanisme kelembagaan untuk arbitrase, evaluasi, dan mengadili pilihan sosial.

Akuntansi terus berkembang mengikuti perkembangan pasar (Lassou dan Hopper, 2016). Penelitian mengenai *sustainability accounting* telah banyak dilakukan di perusahaan, namun masih sedikit yang melakukan penelitian akuntansi pada masyarakat lokal pesisir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai alat pegangan untuk penelitian. Peneliti menggunakan paradigma *postmodern* dan perspektif *Political Economy Accounting* untuk memperoleh gambaran mengenai apa yang terlihat tetapi mendekonstruksi sesuatu yang melatarbelakangi fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mendekonstruksi realitas ekonomi, sosial, dan lingkungan pada masyarakat pesisir dengan perspektif *Political Economy Accounting*.

Metoda

Menggali lebih dalam sebuah fenomena yang ada merupakan tujuan metode kualitatif. Metode kualitatif berpandangan bahwa hubungan peneliti dengan realitas (fakta) lapangan bersifat independen, bebas nilai, dan tidak bias, serta lebih bersifat subjektif. Metode kualitatif merupakan salah satu model dari penelitian humanistik yang menjadikan manusia sebagai subjek utama dalam sebuah peristiwa. Paradigma yang digunakan adalah *postmodern* yang dikenal dengan dekonstruksi yang merupakan karakteristik mendasar dan esensial (Muhajir, 2000). Pola berpikir kontradiksi, kontroversi, paradoks, dan dilematis merupakan pola pikir *postmodern*. Posmodernisme melihat realitas sebagai problematis yang selalu perlu *inquired, discovered*, dan cenderung kontroversial. Hal ini dipandang penting mengingat

⁴ Penelitian pada industri biodiesel (Naylor dan Higgins, 2017), listrik (Warren dan Seal, 2018), batu bara (Montrone et al., 2021), politik (Alexandre et al., 2022), pendidikan (Bessant et al., 2017), akuntansi (Lassou dan Hopper, 2016), akuntansi pemerintahan (Lassou dan Hopper, 2016), sektor publik dan privatisasi (Montrone et al., 2021) bahkan merambat pada usaha kecil milik keluarga (Ahmed dan Uddin, 2018)

penelitian berada pada lintas disiplin ilmu dan hendak melakukan dekonstruksi atas permasalahan yang terjadi.

Political Economy Accounting (PEA) diperkenalkan pertama kali oleh Tinker (1980) melalui artikel yang berjudul *Towards a political economy of accounting: an empirical illustration of the cambridge controversies*. Tinker (1980) mencoba menghadirkan sebuah kajian ekonomi dan politik dalam menganalisis perusahaan berdasarkan informasi akuntansi yang tersedia. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan perspektif *Political Economy Accounting* sebagai alat analisis dari pendekatan kritis yang dikombinasikan antara kajian ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan, yang dielaborasi dengan kearifan lokal dalam memecahkan persoalan di lapangan. Penelitian ini mengambil sebuah kasus abrasi yang terjadi di Galesong dan unit analisis merupakan komponen dasar dari studi kasus. Unit analisis penelitian ini ingin melihat permasalahan abrasi pantai di Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan.

Penelitian ini mengambil fokus *triple bottom line* (ekonomi, sosial, dan lingkungan) pada masalah abrasi di Galesong. Peneliti ingin menggali lebih dalam dan mendekonstruksi realitas ekonomi, sosial, dan lingkungan pada masyarakat pesisir dengan perspektif akuntansi ekonomi politik. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kategori informan yang diwawancarai terbagi menjadi dua yaitu aktor formal, meliputi pegawai Dinas Budidaya Air Payau, serta aktor informal, meliputi masyarakat pesisir yang tinggal di sepanjang pantai Galesong. Dengan demikian, subjektivitas dan intersubjektivitas data terakomodasi dengan kategorisasi kedua sumber data primer tersebut. Adapun data sekunder merupakan data tambahan sebagai elaborasi data primer.

Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumen dan materi audio-visual. Wawancara (*interview*) dilakukan dengan tidak terstruktur mengalir sesuai topik - topik yang hendak ditanyakan pada informan. Peneliti mewawancarai informan secara acak dan berulang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Mengumpulkan data-data hasil temuan lapangan dan literatur yang ada berupa data primer dan data sekunder. Kemudian, menafsirkan data -data baik data primer maupun sekunder yang kemudian dikaitkan dengan landasan teori, dan yang terakhir menarik kesimpulan dari pemaknaan atas data - data yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Dusun Beru Desa Palalakkang merupakan salah satu dusun yang mengalami abrasi pantai dan telah membangun tanggul untuk menahan ombak dan abrasi. Pada satu kesempatan, peneliti berjumpa dengan salah satu nelayan yang berada di dusun tersebut dan peneliti mempertanyakan maksud keberadaan tanggul tersebut mengapa hanya ada di dusun ini saja. Di dekat tanggul itu peneliti bertanya kepada nelayan, adapun jawaban informan adalah

“apa yang pernah terjadi di sini Daeng Ngitung. Mengapa tanggul ini buat ? Nelayan iu menjawab “tanggul ini baru saja selesai dikerjakan”. Peneliti “Apakah sebelumnya pernah terjadi abrasi?” Nelayan : Ya, bahkan tempat kita berdiri saat ini (bibir pantai) dahulunya terdapat rumah! rumahnya saudara saya yang terkena abrasi. Di tempat ini sampai ke sana (sambil menunjuk ke arah laut) merupakan pemukiman warga. Hal itulah menyebabkan mengapa ada tanggul beton ini karena terjadi abrasi (angngokoki antama pa'rasangang dalam bahasa daerah)”

Peneliti kembali bertanya Apakah ada kaitannya dengan kapal pengeruk pasir seperti yang ramai diberitakan? Kata Nelayan “bukan, kapal tersebut keberadaan baru saja melakukan aktivitas pengerukan pasir. Tanggul ini sudah dikerjakan sebelum kapal itu datang” Di tempat yang berbeda peneliti menemui nelayan lain yang mengatakan “seingat saya, dahulu untuk dapat sampai ke pantai harus berjalan sekitar sekitar 200 meter” Dampak yang ditimbulkan seperti mempercepat proses abrasi pantai, merusak ekosistem laut, dan menghilangkan mata pencaharian nelayan setempat. Abrasi sendiri telah sampai ke daratan tempat tinggal dan pemukiman masyarakat. Cara yang lazim digunakan untuk mencegah terjadinya abrasi pantai adalah membuat tanggul di sepanjang pantai. Seperti tanggul yang ada di belakang pemukiman nelayan yang memiliki tinggi ± 2 meter, lebar ± 2 meter, dan panjang ± 150 meter. Berdasarkan informasi yang diberikan Nelayan⁵ jumlah anggarannya yang dibutuhkan untuk membangun tanggul seperti itu, sebesar Rp 3.000.000.000,- s/d Rp 4.000.000.000,- Adapun gambar tanggul yang berada di belakang rumah Daeng Emba adalah sebagai berikut :

⁵ Percakapan nomor 23 tanggal 18 September 2018 Menit 00:34:17 s/d 00:34:23



Sumber : Dokumentasi Lapangan (2019)⁶

Gambar 1. Tanggul Pemecah Ombak

Peneliti bertemu dengan Pak Ilham Mone salah satu pegawai pada Balai Observasi Perikanan Air Payau Kabupaten Takalar membahas mengenai abrasi. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh Daeng Ngitung mengenai rumah keluarganya yang terkena abrasi. Adapun penjelasan Daeng Mone mengenai keadaan pantai pada masa lalu dan saat ini adalah sebagai berikut :

“Jadi sudah cocok itu, kalau di pala’lakkang tanahnya jauh sekali keluar, karena di daerah sini saja, itu pulau Sanrobengi di sini pak - sambil memberikan perkiraan jarak, orang bisa berenang ke sebelah saking dekatnya, sekarang sudah tidak bisa. Sebenarnya daerah sini merupakan tanjung yang mencolok keluar pak. Abrasi yang membuat itu terputus. Ada yang tersisa sedikit itu anggaphlah sebagai pulau karena terpisah dengan daratan. Padahal dahulu itu bersambung dengan daratan. Jadi banyak di daerah sana itu pemilik tanah kehilangan tanahnya karena sudah menjadi laut. hehehe... terbukti pak ketika mau peresmian pelabuhan. Di sini kan perencanaan pelabuhan kapal penumpang. Ternyata banyak pendangkalan itu ke arah sanro bengi sehingga kapal itu ragu masuk ke situ, akhirnya pelindo putuskan tidak jadi itu”

Menurut informasi yang diperoleh dari Daeng Mone, Perusahaan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memperkirakan biaya operasional untuk pengerukan pasir saja mesti dibutuhkan sekitar Rp 40.000.000 s/d Rp 60.000.000 per tahun. Hal itu disebabkan karena di perairan selat Makassar khususnya di Galesong memiliki dua tipe ombak yaitu pada musim badai (musim barat) bulan November s/d Maret ombak menarik yang menyebabkan abrasi dan pada musim timur bulan April s/d November itu membentuk daratan yang menyebabkan sedimentasi.

⁶ Gambar 1 diperoleh tanggal 23 September 2018 dan gambar 2 diperoleh pada tanggal 10 Februari 2019 di Dusun Beru Desa Pala’lakkang, serta gambar 3 diperoleh pada tanggal 25 April 2018

Adapun gambar pemecah ombak yang dibuat oleh pihak balai observasi perikanan air payau Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :



Sumber : Dokumentasi Lapangan (2018)⁷

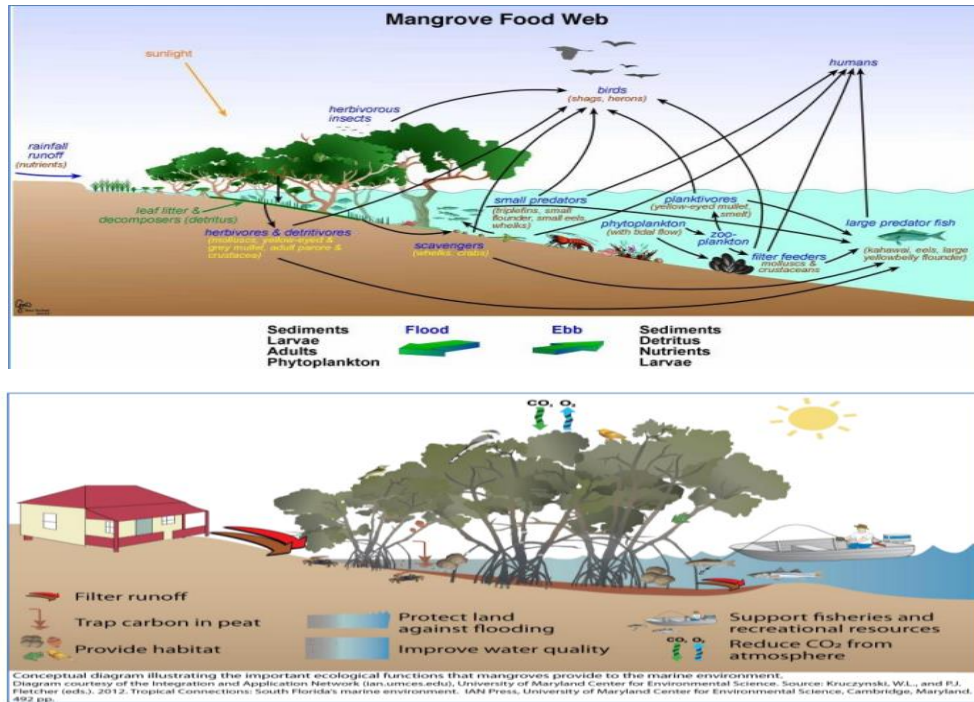
Gambar 2. Pemecah Ombak Pada bagian belakang Kantor Balai Observasi Perikanan Air Payau Desa Boddia Kabupaten Takalar

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak balai observasi perikanan air payau Kabupaten Takalar membuat tanggul pemecah ombak sekitar 50 meter ke arah laut. Peneliti bertanya “tentukan biayanya tidak sedikit kan pak, buat pancang itu?”. Iya” jawaban singkat oleh Daeng Mone. Lalu peneliti mempertanyakan biaya pembuatan pancang pemecah ombak “*kalau bapak dengar dengar, anggaran untuk membuat pancang pemecah ombak itu berapa itu ?*”. jawab Daeng Mone “*sekitar 25 juta satu kali keluar tapi jaraknya itu sekitar 200 pak. 200 meter ada lagi, keluar lagi, 200 meter ada lagi keluar lagi kita di belakang kantor ini ada 3 pemecah ombak keluar. nah, ternyata anu, ternyata sangat membantu sekali. sekalipun pada musim musim bulan ini ternyata tidak ini lagi*”

Pembahasan

Ada banyak manfaat dan strategi pemanfaatan *mangrove* (Ali, 2015; Damayanti et al., 2020; Dinilhuda et al., 2018; Edyanto, 2019; Gumilar, 2012; Jerowaru et al., 2022; Juhri et al., 2021; Kepel et al., 2019; Krisnandi et al., 2021; Pakedai dan Raya, 2014; Senoaji dan Hidayat, 2017; Suleman et al., 2018; Utomo et al., 2018; Yuliani dan Herminasari, 2017). Selain untuk pemecah ombak (Baeda et al., 2016; Maolani et al., 2021), *mangrove* dapat menjadi tempat bertelur ikan dan kepiting (rajungan). Penanaman pohon bakau pada hutan kawasan *mangrove* wajib dijaga keberadaannya, karena bukan tidak mungkin pohon bakau yang sudah besar nantinya akan ditebang untuk dijadikan kayu bakar atau arang yang kualitasnya terkenal bagus. Untuk melihat lebih jauh manfaat bakau dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut:

⁷Gambar diperoleh pada tanggal 26 November 2018



Sumber : Courtesy of miss Idalia Machuca, (2013)

Gambar 3. Pentingnya Mangrove

Dalam masyarakat pesisir di Galesong terdapat kekuasaan yang memainkan peran dan pengaruh yang berperan dalam pengambilan keputusan. Mereka adalah pemilik modal yang terbagi atas dua golongan yaitu pemilik modal (papalele) dan pemilik kapal (juragang). Kedua pihak ini yang memainkan peran dalam proses pendistribusian laba pada nelayan. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sangat bergantung terhadap kedua pihak tersebut untuk menjaga kelangsungan hidup. Untuk melakukan tindakan membutuhkan *cost* dalam setiap aktivitas yang mayoritas diperoleh dari kedua pihak tersebut. Kecuali nelayan telah pulang melaut dan memperoleh hasil pembagian yang melebihi biaya melaut, maka nelayan memiliki uang sendiri. Laba ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelum melaut. PEA memandang bahwa terdapat hubungan patron dan klien antara pemilik modal dengan nelayan yang membuat mereka memiliki ikatan yang lebih kuat daripada sekedar hubungan pemilik modal dan agen. Oleh karena itu untuk mendapatkan empati, masyarakat pesisir terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada para pemilik modal dan pemilik kapal

Ketika telah mendapatkan legitimasi dari kedua pihak tersebut, permasalahan abrasi dapat diselesaikan dengan swadaya masyarakat. Selanjutnya untuk memecahkan permasalahan abrasi pantai adalah melakukan penanaman bakau⁸ (*mangrove*) di

⁸ *Mangrove* didefinisikan sebagai varietas komunitas pantai tropik dan subtropik berupa pepohonan atau semak-semak yang tumbuh di daerah yang terkena pasang surut air laut. *Mangrove* tidak hanya tertuju pada satu jenis spesies tertentu, tetapi mencakup semua

sepanjang pesisir pantai. *Mangrove* adalah spesies tropis pohon atau semak yang telah beradaptasi untuk hidup di daerah pesisir. Daeng Mone menyampaikan kepada peneliti bahwa kisaran harga pohon bakau antara Rp 1.500 s/d Rp 2.000 per pohon. Berbagai macam jenis pohon bakau yang dapat dijadikan sebagai mitigasi⁹ untuk abrasi laut maupun sedimentasi. Untuk itu perlu diketahui mengenai zonasi *mangrove* yang menjelaskan urutan empat jenis berbeda bakau ditemukan di darat. Dari daratan *mangrove buttonwood* ditanam jauh dari air, lalu *mangrove* putih, kemudian *mangrove* hitam dan *mangrove* merah ditanam terdekat ke air.

Adapun perbandingan biaya antara tanaman bakau dengan pemecah ombak adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Biaya Pembuatan Tanggul Untuk Mitigasi

Keterangan	Ukuran Pemecah Ombak	Total
Tanggul	Panjang 150 Meter	Rp 2.000.000.000 s/d Rp 3.000.000.000
	Lebar 2 Meter	
	Tinggi 2 Meter	
Pancang pemecah ombak	Panjang 50 Meter (3 lapis dengan jarak antara pemecah ombak masing - masing 25 meter)	Rp 75.000.000
Pohon Bakau Rp 2.000 x 10.000 pohon	2.500 meter (jika pohon bakau disusun sebanyak 5 lapis dengan jarak masing - masing pohon 50 cm)	Rp 20.000.000

Sumber : Data Lapangan Diolah (2018)

Pemberdayaan *Mangrove* Dengan Tetap Menjaga Kelestariannya

Minimnya informasi yang sampai pada masyarakat pesisir dan komunikasi yang dibangun oleh pihak yang terkait, membuat *mangrove* tidak dianggap “penting”. Padahal hutan *mangrove* dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan sebagai mitigasi abrasi serta sedimentasi. Informasi mengenai perhitungan nilai dan biaya dari hasil pemanfaatan hutan *mangrove*, perlu diperhitungkan dengan matang. Pemanfaatan hutan *mangrove* dapat dilakukan apabila hutan telah terbentuk (ada). Perhitungan tersebut dapat mendukung kehidupan sosial dan ekonomi sekaligus sustainabilitas alam yang berjalan secara harmoni. Perhitungan nilai dan biaya dapat dihitung dari hasil pemanfaatan hutan *mangrove* dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu

pohon-pohon atau semak-semak di suatu kawasan yang terkena pasang surut air laut dan membentuk suatu komunitas. Bakau merupakan jenis yang dominan menyusun ekosistem mangrove dan umum ditemukan di garis pantai, yang cenderung lebih dekat ke laut dari pada ke darat. Bakau atau *Rhizophora* sp., merupakan salah satu spesies penyusun kawasan *mangrove*.

⁹ Mitigasi adalah suatu rangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun memberikan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana

Perhitungan Potensi Sumber Daya *Mangrove*

Metode ini dilakukan untuk menghitung potensi sumber daya *mangrove* yang bisa didapatkan dari pemanfaatan optimal seluruh luas lahan *mangrove*. Dari perhitungan ini dapat diketahui potensi profit yang bisa didapatkan jika pemanfaatan hutan *mangrove* dilakukan optimal.

$$V_{Ng} = L \times B_T$$

Keterangan

V_{Ng} = Nilai *Nursery Ground*

L = Luas

B_T = Biaya Tambak

Sebagai simulasi dalam memberikan nilai ekonomi pada hutan mangrove dapat menggunakan pendekatan biaya tambak. Untuk pembuatan kolam tambak diketahui nilai *Nursery Ground* Rp 10.000/m² untuk 38.000 ekor udang. Jika 1 Hektar (Ha) = 10.000 m², dengan luas tambak dikeluarkan 4,31 Ha dan biaya pembuatan tambak yang dikeluarkan setiap 5 tahun (umur ekonomis tambak), maka manfaat hutan *mangrove* sebagai *Nursery Ground* adalah:

$$\text{Rp } 10.000/\text{m}^2 \times 10.000 \text{ m}^2 = \text{Rp } 100.000.000 : 5 \text{ Tahun} = \text{Rp } 20.000.000/\text{Ha}$$

Nilai hutan *mangrove* sebagai *nursery ground* dapat dihitung hanya untuk hutan mangrove yang masih utuh, yaitu ;

$$4,31 \text{ Ha} \times \text{Rp } 20.000.000/\text{Ha} = \text{Rp } 86.200.000$$

Kami tidak menyarankan untuk pemanfaatan *mangrove* untuk dikonversi menjadi batang kayu olahan dengan alasan apapun. Hal tersebut menjadi celah rusaknya hutan *mangrove*. Hutan mangrove pada daerah – daerah pesisir khususnya yang mengalami abrasi dipandang mendesak untuk dilaksanakan penanaman. Dibutuhkan kerja sama dan kesadaran berbagai pihak, dan perlu dilakukan tindakan cepat mengingat abrasi terus berlangsung. Peneliti menyarankan apabila kegiatan penanaman dilakukan pada wilayah pesisir Galesong, sebaik pada musim timur yakni bulan April sampai dengan November. Alasannya pada bulan tersebut di Galesong ombak membentuk sedimentasi, ketika beberapa bulan ditanam pohon bakau telah memiliki akar yang kuat dan menancap ke tanah. Tentu hal tersebut hanya berlaku di sekitar wilayah pantai Galesong dan tidak untuk digeneralisasi pada tempat yang berbeda. Dibutuhkan penelitian yang lain untuk penentuan waktu penanaman bakau pada tempat yang hendak ditanami bakau.

Dengan demikian harmonisasi antara alam, manusia, ekonomi (*triple bottom line*) dapat berjalan dengan selaras. Nelayan terhindar dari masalah abrasi pantai sekaligus memperoleh nilai plus dari bakau yang merupakan rumah bagi ikan dan kepiting. Pemenuhan kebutuhan dasar nelayan dapat memacu masyarakat untuk menjaga kelestarian alam khususnya wilayah pesisir. Proyek ini bersifat jangka panjang dan membutuhkan peran dari semua pihak khususnya perusahaan dan pemerintah. Perusahaan dan pemerintah yang berminat melakukan investasi lingkungan / mengeluarkan biaya lingkungan dapat memanfaatkan laporan

keberlanjutan yang dihasilkan oleh *sustainability accounting* yang berlandaskan pada *triple bottom line*. Salah satu item yang perlu diungkapkan dalam pelaporan *sustainability reporting* yang menggunakan standar GRI adalah keberadaan masyarakat lokal. Masyarakat lokal diatur dalam GRI 413 yang mengungkapkan mengenai operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan.

Simpulan

Hasil kajian dengan menggunakan PEA dalam memahami distribusi laba pada masyarakat pesisir terpusat pada pemilik modal (papalele) dan pemilik kapal (juragang) yang merefleksikan kekuasaan dan memainkan peran pada daerah pesisir di Galesong. PEA berusaha menilai dan mengkritisi praktek keadilan dibalik angka (laba) yang diperoleh nelayan secara menyeluruh. Angka pendapatan yang diperoleh nelayan erat kaitannya dengan kepedulian untuk memperhatikan lingkungan, karena aspek sosial masih terikat hubungan emosional *patron klien* (dengan pemilik modal dan pemilik kapal) dan berusaha mempertahankan kelangsungan hidup keluarga dengan mengharapkan kelebihan dari bagi hasil setelah dikurangi perongkosan selama melaut (aspek ekonomi). Dengan demikian, harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*) sulit terealisasi apabila kebutuhan pokok masih belum terpenuhi dengan layak.

Adapun permasalahan abrasi perlu dilakukan penanganan di sepanjang pesisir pantai, dengan menanam bakau. Bakau tidak seperti tanggung yang terbuat dari batu yang hanya memiliki fungsi sebagai penahan ombak, tetapi dapat menjadi tempat bertelur ikan dan kepiting. Dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pesisir pantai ikut terjaga, serta alam lestari. Orisinalitas / nilai - hasil dekonstruksi yang ditawarkan berasal dari kearifan lokal masyarakat pesisir yang jenius yang mulai terlupakan. Makalah ini mencoba mendekonstruksi realitas masyarakat pesisir dalam memberikan solusi tanpa merusak mata pencaharian utama masyarakat. Parameter penerapan konsep *triple bottom line* adalah adanya keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Keterbatasan penelitian terletak pada waktu dan biaya yang dimiliki oleh peneliti. Saran bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian dalam bidang akuntansi untuk memperdalam kajian terkait daerah pesisir dengan melakukan kolaborasi berbagai disiplin ilmu lain.

Daftar Pustaka

- Ahmed, S., & Uddin, S. (2018). Toward a political economy of corporate governance change and stability in family business groups: A morphogenetic approach. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(8), 2192–2217. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2017-2833>
- Alexandre, F., Bação, P., & Veiga, F. J. (2022). The political economy of productivity growth. *European Journal of Political Economy*, 102185. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2022.102185>
- Ali, M. (2015). Pemanfaatan ruang kawasan pesisir sebuah " keniscayaan " ? Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2015, October 2015, 1–10.
- Amalia, T. H. (2014). Konsep Penetapan Harga Jual Papalele Dalam Lingkup Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Maluku. Brawijaya.
- Baeda, A. Y., Klara, S., & Mulyati, R. (2016). Mitigasi Bencana Tsunami di Pantai Losari Makassar , Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Enjiniring (JPE)*, 20(1), 21–27.
- Bell, F., & Lehman, G. (1999). Recent Trends in Environment Accounting: How Green Are Your Account. *Accounting Forum*.
- Bessant, J., Farthing, R., & Watts, R. (2017). *The Precarious Generation ; A Political Economy of Young People*. University of California Press.
- Birkinbine, B. J. (2020). Political Economy of Peer Production. *The Handbook of Peer Production*, 33–43. <https://doi.org/10.1002/9781119537151.ch3>
- Cohen, N., & Robbins, P. (2011). *Green Business: An A-to-Z Guide*. In Thousand Oaks,. SAGE Publications Inc.
- Courtesy of miss Idalia Machuca. (2013). *Mangroves* (Issue August).
- Damayanti, C., Amukti, R., & Suyadi, S. (2020). Potensi Vegetasi Hutan Mangrove untuk Mitigasi Intrusi Air Laut di Pulau Kecil. *Oceanologi Dan Limnologi Di Indonesia*, 5(2), 75. <https://doi.org/10.14203/oldi.2020.v5i2.313>
- Damaywanti, K. (2013). Dampak Abrasi Pantai terhadap Lingkungan Sosial (Studi Kasus di Desa Bedono , Sayung Demak). *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan 2013*, 363–367.
- de Beer, P., & Friend, F. (2006). Environmental accounting: A management tool for enhancing corporate environmental and economic performance. *Ecological Economics*, 58(3), 548–560. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.07.026>
- Dinilhuda, A., Akbar, A. A., & Jumiati, J. (2018). Peran Ekosistem Mangrove Bagi Mitigasi Pemanasan Global. *Jurnal Teknik Sipil*, 18(2). <https://doi.org/10.26418/jtsft.v18i2.31233>
- Edyanto, C. H. (2019). Sistem Pertahanan Kombinasi Untuk Melindungi Kota Pantai Dari Bahaya Tsunami. *Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia*, 17(2), 7–14. <https://doi.org/10.29122/jsti.v17i2.3426>
- Gray, R. (1992). Accounting And Environmentalism: An Exploration Of The Challenge Of Gently Accounting For Accountability, Transparency And Sustainability. *Accounting Organizatoion and Society*, Vol. 17(No. 5), Hal. 399-425.
- Gumilar, I. (2012). Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Pengeloalaan Ekosistem Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Akuatika*, Vol. III, Hal. 198 211.
- Handiyono Michella, Y., Sukoharsono Eko, G., & Saraswati, E. (2017). THE ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE TOWARD COMPANY STOCK PRICE CRASH RISK. *Russion Journal of Algricultural and Socio-Economic Sciences*, 8(68). <https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-08.23>

- Harari, Y. N. (2016). *Homo Deus_ A Brief History of Tomorrow*. Harper Collins Publisher.
- Hartatil, A. Y. (2007). Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan : Upaya Mencari Jalan Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 11(November), Hal. 193-208.
- Hernowo, R. A. (2012). Penanggulangan Abrasi Pantai Utara Jawa Barat Di Pantai Dadap Kabupaten Indramayu Dengan Kajian Penanganan Struktur dan Non-Struktur. *KoNTekS* 6, November, 45–52.
- Jerowaru, K., Barat, N. T., Hadi, A., Wahyuni, D., Safitri, N., Jannah, N. R., & Gifari, M. (2022). Rehabilitasi Lahan Mangrove Sebagai Strategi Mitigasi Bencana Alam di Desa. 1–6.
- Juhri, T., Tan, A., Siregar, L. H., Dharmawangsa, U., & Dharmawangsa, U. (2021). PERANAN EKOSISTEM HUTAN MANGROVE PADA MITIGASI BENCANA BAGI MASYARAKAT PESISIR PANTAI. November, 27–35.
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Konstruktif: Riset Akuntansi Membumikan Religiositas* (Adji Dedi Mulawarman (ed.); Cetakan Pe). Yayasan Rumah Peneleh.
- Kepel, T. L., Ati, R. N. A., Daulat, A., Rustam, A., Suryono, D. D., Sudirman, N., & Hutahaeon, A. A. (2019). Cadangan Karbon Ekosistem Mangrove di Sulawesi Utara dan Implikasinya Pada Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. *Jurnal Kelautan Nasional*, 14(2), 87–94.
- Krisnandi, R., Hanafi, M. N., Ramli, V. V., & Prabowo, I. A. (2021). Pemanfaatan Citra Landsat 8 Dan Data Dem untuk Mengetahui Tingkat Kerentanan Dan Mitigasi Banjir Rob Di Daerah PPKalongan Jawa Tengah. *ReTII*, 2021(November), 408–416.
- Lassou, P. J. C., & Hopper, T. (2016). Government accounting reform in an ex-French African colony: The political economy of neocolonialism. *Critical Perspectives on Accounting*, 36, 39–57. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.10.006>
- Maolani, R. A., Nuryati, I., Tinggi, S., Asuransi, M., Tinggi, S., Asuransi, M., Mangrove, H., & Eksperimen, M. (2021). MITIGASI RISIKO DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN TANAMAN MANGROVE : SURVEI PELESTARIAN HUTAN. 8(2), 31–38.
- Ministry of the Environment Japan. (2005). *Environmental Accounting Guidelines Ministry of the Environment*. Ministry of the Environment Japan, February.
- Montrone, L., Ohlendorf, N., & Chandra, R. (2021). The political economy of coal in India – Evidence from expert interviews. *Energy for Sustainable Development*, 61, 230–240. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2021.02.003>
- Muhajir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Keempat, C). Rake Sarasih.
- Naylor, R. L., & Higgins, M. M. (2017). The political economy of biodiesel in an era of low oil prices. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 77(February), 695–705. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.04.026>
- Pakedai, K. T., & Raya, K. K. (2014). Arahan Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove: Kasus Pesisir Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 11(1), 43–57. <https://doi.org/10.15294/jg.v11i1.8039>
- Prawiradisastra, S. (2003). Permasalahan Abrasi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu. *Alami*, Vol. 8(No. 2), 4–46.
- Sari, M. R. (2020). Green Accounting berfokus pada perlakuan akuntansi dan pelaporan informasi atas pengorbanan aset-aset ekonomi perusahaan untuk biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan. <https://Ppmschool.Ac.Id/En/Dampak-Green-Accounting-Terhadap-Kinerja-Kuangan/>.
- Senoaji, G., & Hidayat, M. F. (2017). PERANAN EKOSISTEM MANGROVE DI KOTA PESISIR BENGKULU DALAM MITIGASI PEMANASAN GLOBAL MELALUI PENYIMPANAN KARBON (The Role of Mangrove Ecosystem in the Coastal City of Bengkulu in Mitigating Global Warming through Carbon sequestration). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(3),

327. <https://doi.org/10.22146/jml.18806>

- Setyandito, O., & Triyanto, J. (2007). Analisa Erosi Dan Perubahan Garis Pantai Pada Pantai Pasir Buatan Dan Sekitarnya Di Takisung, Propinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 7(No. 3), Hal. 224-235.
- Sukoharsono, E. G. (2017). Dialog Imajiner Luca Pacioli dan Luca Serius : Green Accounting di Indonesia. *September*, 1-14.
- Suleman, Y., Rachman, T., Departemen, M., Kelautan, T., Hasanuddin, U., Departemen, D., Kelautan, T., & Hasanuddin, U. (2018). Tinjauan degradasi lingkungan pesisir dan laut kota makassar terhadap kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. *Seminar Sains Dan Teknologi Kelautan, Gedung CSA Kampus Fakultas Teknik UNHAS Gowa, 27(September 2018)*, 26-32.
- Tarigan, M. S. (2007). Perubahan Garis Pantai Di Wilayah Pesisir Perairan Cisadane, Provinsi Banten. *Makara Sains*, Vol. 11(No. 1), Hal. 49-55.
- Tinker, T. (1980). *Towards a political economy of accounting: an empirical illustration of the Cambridge controversies*. Accounting, Organizations and Society.
- Tinker, T. (1985). *Paper Prophets : A Social Critique Of Accounting*. Praeger Piblisers.
- Utomo, B., Budiastuty, S., & Muryani, C. (2018). Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 117. <https://doi.org/10.14710/jil.15.2.117-123>
- Volosin, E. (2008). *Environmental Accounting*. GRIN Verlag.
- Warren, L., & Seal, W. (2018). Using investment appraisal models in strategic negotiation: The cultural political economy of electricity generation. *Accounting, Organizations and Society*, 70, 16-32. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.04.001>
- Yuliani, S., & Herminasari, N. S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 6(2), 42-53. <https://doi.org/10.21009/jgg.062.04>